



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

**BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN ANGGARAN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

PENDAHULUAN	
BAB I	<p>PENDAHULUAN</p> <p>Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalah pahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalah pahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.</p> <p>Kesalah pahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalah pahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.</p> <p>1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD</p> <p>a. Maksud</p> <p>Laporan Keuangan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan ini merupakan bagian dari Laporan Keuangan yang disusun untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah</p>

	<p>ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Tujuan Umum</p> <p>Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.</p> <p>c. Tujuan Khusus</p> <p>Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah; 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi; 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya. <p>1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD</p> <p>Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
--	---

	<p>Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan</p>
--	---

	<p>Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008 Nomor 9); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 12. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023. 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023. <p>1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD</p> <p>Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca, yang mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan,</p>
--	--

	<p>informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Bapedalitbang Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 meliputi hal-hal berikut:</p> <p>BAB I : Pendahuluan,</p> <p>Bab ini mencakup penjelasan mengenai maksud dan tujuan Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.</p> <p>BAB II : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD.</p> <p>Bab ini mencakup penjelasan mengenai Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Bapedalitbang, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan.</p> <p>BAB III : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.</p> <p>Bab ini mencakup penjelasan mengenai rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Bapedalitbang pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan penerapan basis akrual atas pendapatan dan beban dan rekonsiliasi penerapan basis kas.</p> <p>BAB VI : Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD</p> <p>Bab ini berisi penjelasan terkait informasi-informasi pelengkap lainnya yang perlu dipaparkan sebagai pendukung dari laporan keuangan antara lain: kondisi perekonomian tahun 2022, penjelasan umum RPJMD Tahun 2021-2026 dan gambaran umum Bapedalitbang.</p> <p>BAB V : Penutup</p> <p>Bab ini menyajikan konklusi atas laporan yang telah disusun rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.</p>
--	---

BAB II**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD****2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD**

Tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, mengalokasikan Belanja TA. 2023 dengan jumlah total sebesar Rp. 6.004.151.562,- yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 5.985.334.252,- yang terdiri dari:
 - a) Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.872.986.413,-
 - b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.112.365.839,-
2. Belanja Modal berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 58.817.310,-

Pada akhir tahun anggaran 2023, dari seluruh belanja sebesar Rp. 6.004.151.562,- yang dianggarkan telah terealisasi sebesar Rp. 5.886.282.023,00,- atau 97,39% dari total anggaran belanja. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp. 5.830.221.623,00,- atau 97,41%, sementara Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 56.060.400,00 atau 95,31% dari total anggarannya.

Realisasi masing-masing jenis belanja dibanding anggarannya dapat digambarkan sebagai mana tabel berikut:

**REALISASI BELANJA
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Uraian	TA. 2023 (Rp)		Capaian (%)
		Anggaran	Realisasi	
II	BELANJA DAERAH	6.044.151.562	5.886.282.023	97.39
2.1	BELANJA OPERASI	5.985.334.252	5.830.221.623	97.41
2.1.1	Belanja Pegawai	3.872.986.413	3.808.243.596	98,33
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.112.365.839	2.021.978.027	95,72
2.2	BELANJA MODAL	58.817.310	56.060.400	95,31
2.2.1	Belanja Modal peralatan dan Mesin	58.817.310	56.060.400	95,31

Seluruh Belanja digunakan untuk mencapai sasaran strategis Bapedalitbang dalam mendukung pencapaian RPJMD Tahun 2021-2026 dan prioritas RKPD Tahun 2023 melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari 2 urusan, 4 program, 14 kegiatan dan 32 Sub kegiatan.

Target dan realiasi belanja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan selama Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel sebagai

berikut:

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB-KEGIATAN BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Tahun 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.044.351.562	5.886.282.023	97,38
A	URUSAN PERENCANAAN	5.840.730.048	5.685.867.428	97,35
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.217.896.510	5.091.890.522	97,59
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.390.256	78.335.400	99,93
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.390.256	78.335.400	99,93
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.884.398.413	3.801.840.596	97,87
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.788.338.413	3.727.853.596	98,40
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96.060.000	73.987.000	77,02
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	670.113.476	649.883.459	96,98
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.015.272	16.391.700	96,34
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.459.600	2.435.000	99,00
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.811.043	35.293.000	98,55
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.787.961	19.737.540	99,75
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.600.000	16.220.000	87,20
1.3.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	22.730.000	22.492.150	98,95
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	553.709.600	537.314.069	97,04
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.817.310	56.060.400	95,31
1.4.1	Pengadaan Mebel	58.817.310	56.060.400	95,31
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.958.088	326.097.300	95,08
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.292.000	97.505.667	86,83
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.666.088	228.591.633	99,10
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.218.967	179.673.367	98,06
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.950.217	67.644.850	98,11

1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Peorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	61.690.000	60.058.767	97,36
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.100.000	26.056.550	99,83
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.478.750	25.913.200	97,86
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<u>474.908.664</u>	<u>462.622.156</u>	<u>97,41</u>
2.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	465.523.761	453.640.256	97,45
2.1.1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Peencanaan Pembangunan Daerah	465.523.761	453.640.256	97,45
2.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	9.384.903	8.981.900	95,71
2.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8.573.826	8.178.900	95,39
2.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	811.077	803.000	99,00
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<u>147.924.874</u>	<u>131.354.750</u>	<u>88,80</u>
3.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	96.530.110	95.351.500	98,78
3.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	754.800	754.500	99,96
3.3.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3.721.500	3.721.500	100,00
3.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	92.053.810	90.875.500	98,72
3.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	26.493.093	16.843.650	63,58
3..2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.745.505	4.930.200	73,09
3..2.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	6.287.519	3.204.250	50,96
3..2.3	Koordinasi Pelaksaasn Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pemabngunan Daerah Bidang SDA	6.712.219	3.630.200	54,08
3..2.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.747.850	5.079.000	75,27
3.3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	24.901.671	19.159.600	76,94

3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13.801.040	12.339.400	89,41
3.3.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	7.623.755	4.183.200	54,87
3.3.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3.476.876	2.637.000	75,84
B	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	205.009.775	202.339.780	98,70
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	205.009.775	202.339.780	98,70
1.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	171.310.031	169.354.255	98,86
1.1.1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	171.310.031	169.354.255	98,86
1.2	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	33.699.744	32.985.525	97,88
1.2.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	33.699.744	32.985.525	97,88
J U M L A H		6.044.351.562	5.886.282.023	97,38

2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapedalitbang melalui APBD tahun Anggaran 2023 ini. Hal ini terlihat dari seluruh target kinerja yang direncanakan dapat tercapai dan selesai tepat waktu, seperti: RKPD Tahun 2023; RKPD Perubahan Tahun 2023; Renja PD Tahun 2023; Perubahan Renja PD Tahun 2023; Evaluasi RKPD, Rancangan awal RPJPD 2025-2045, Evaluasi RPJMD 2021-2026, FS BUMD Aneka Usaha, dan Analisis Potensi Daerah, Rencana Aksi Daerah dan Layak Anak, Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Rancangan Grand Desaian Pembangunan Kependudukan serta tugas dan fungsi lainnya yang menjadi tanggung jawab Bapedalitbang.

Penugasan lain dari Bupati yang juga telah dituntaskan dengan baik pada tahun 2023 antara lain: Tim TAPD Penyusunan APBD TA. 2023; Pergeseran dan Perubahan APBD TA. 2023 dan Fasilitasi Pelaporan AKIP Daerah.

Beberapa tantangan yang dihadapi untuk penuntasan kinerja tersebut di atas antara lain:

	<ul style="list-style-type: none">- Terbatasnya jumlah aparatur yang menyebabkan menumpuknya beban kerja yang harus dilaksanakan di luar jam kerja normal.- Belum optimalnya kompetensi aparatur; sehingga kualitas output pekerjaan yang dilakukan secara swakelola belum maksimal.- Masih belum meratanya kompetensi aparatur perencana di seluruh SKPD sebagai mitra kerja utama Bapedalitbang.																																					
BAB III	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 3.1. Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 3.1.1 Pendapatan - LRA <p>Pada tahun anggaran 2023, Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki target Pendapatan Daerah untuk direalisasikan. pada tahun yang lalu terdapat target Pendapatan Asli daerah (PAD) pada pos Retribusi Penyewaan Bangunan yaitu Retribusi Rumah Dinas, pada Tahun 2022 aset tersebut telah dimutasikan ke SKPD lain yaitu Dinas Perikanan dan Pangan.</p> 3.1.2 Belanja - LRA <p>Realisasi Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:</p> <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">TA. 2023 (Rp)</th><th rowspan="2">Capaian (%)</th></tr><tr><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th></tr><tr><td>II</td><td>BELANJA</td><td>6.044.151.562</td><td>5.886.282.023</td><td>97,30</td></tr><tr><td>2.1</td><td>BELANJA OPERASI</td><td>5.985.334.252</td><td>5.830.221.623</td><td>97,41</td></tr><tr><td>2.1.1</td><td>Belanja Pegawai</td><td>3.872.968.413</td><td>3.712.374.274</td><td>95,85</td></tr><tr><td>2.1.2</td><td>Belanja Barang dan Jasa</td><td>2.112.365.839</td><td>2.021.978.027</td><td>95,77</td></tr><tr><td>2.2</td><td>BELANJA MODAL</td><td>58.817.310</td><td>56.060.400</td><td>96,08</td></tr><tr><td>2.2.1</td><td>Belanja Modal</td><td>58.817.310</td><td>56.060.400</td><td>96,08</td></tr></table> <p>Secara detail, rincian masing-masing kelompok, jenis dan objek belanja tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut.</p> Belanja Pegawai: <p>Objek Belanja Pegawai digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/ wakil kepala daerah; pimpinan / anggota DPRD; dan Pegawai ASN. Kompensasi yang diberikan dapat</p>	No	Uraian	TA. 2023 (Rp)		Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	II	BELANJA	6.044.151.562	5.886.282.023	97,30	2.1	BELANJA OPERASI	5.985.334.252	5.830.221.623	97,41	2.1.1	Belanja Pegawai	3.872.968.413	3.712.374.274	95,85	2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.112.365.839	2.021.978.027	95,77	2.2	BELANJA MODAL	58.817.310	56.060.400	96,08	2.2.1	Belanja Modal	58.817.310	56.060.400	96,08
No	Uraian			TA. 2023 (Rp)			Capaian (%)																															
		Anggaran	Realisasi																																			
II	BELANJA	6.044.151.562	5.886.282.023	97,30																																		
2.1	BELANJA OPERASI	5.985.334.252	5.830.221.623	97,41																																		
2.1.1	Belanja Pegawai	3.872.968.413	3.712.374.274	95,85																																		
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.112.365.839	2.021.978.027	95,77																																		
2.2	BELANJA MODAL	58.817.310	56.060.400	96,08																																		
2.2.1	Belanja Modal	58.817.310	56.060.400	96,08																																		

berupa gaji; tunjangan; tambahan penghasilan dan lain sebagainya. Pada Tahun 2023; Belanja Pegawai di SKPD Bapedalitbang dialokasikan untuk 38 orang PNS.

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Pegawai secara terinci disajikan pada tabel berikut ini:

No	Uraian	TA. 2023 (Rp)		Capaian (%)
		Anggaran	Realisasi	
A	BELANJA PEGAWAI	3.872.968.413	3.808.243.596	98,41
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.638.177.977	2.592.850.658	98,28
1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	1.851.524.738	1.843.924.846	99,59
1.2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	189.988.500	189.988.500	100
1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	200.928.125	199.150.000	99,12
1.4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	71.538.900	70.644.900	96,75
1.5	Belanja Tunjangan Beras ASN	116.407.908	116.306.520	99,91
1.6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.983.544	7.902.547	98,99
1.7	Belanja Pembulatan Gaji ASN	55.787	27,898	50,01
1.8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	143.220.602	120.868.956	84,39
1.9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.296.117	3.802.813	88,52
1.10	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.888.424	11.408.556	88,52
1.11	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	6.950.332	-	-
1.12	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.150.160.436	1.039.134.116	98,37
1.13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	84.630.000	80.390.000	94,99

Dari tabel di atas terlihat; bahwa Belanja Pegawai TA. 2023 di Bapedalitbang terealisasi sebesar 98,33 persen dimana dari Rp. 3.872.968.413,00.- yang dianggarkan telah direalisasikan sebesar Rp. 3.806.243,596,00.-.

Belanja Barang dan Jasa:

Objek Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan; termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga. Pada tahun anggaran 2023; tingkat capaian Belanja Barang dan jasa mencapai 95,72 persen dimana dari

Rp.2.112.365.839,00,- yang dianggarkan, terealisasi sebanyak Rp.2.021.978.027,00,-

Jumlah anggaran dan realisasi belanja Barang dan Jasa secara terinci disajikan pada tabel berikut ini:

No	Uraian	TA. 2023 (Rp)		Capaian (%)
		Anggaran	Realisasi	
B	BELANJA BARANG DAN JASA	2.112.365.839	2.021.978.027	95,72
1	Belanja Barang	449.293.183	428.449.518	95,36
1.1	Belanja Barang Pakai Habis	449.293.183	428.449.518,	95,36
2	Belanja Jasa	803.481.056	756.510.717	94,15
2.1	Belanja Jasa Kantor	660.259.717	634.495.017	96,10
2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	23.081.339	1.892.700	8,20
3	Belanja Pemeliharaan	133.010.000	131.387.767	98,78
3.1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	119.290.000	117.683.317	98,65
3.2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.720.000	13.704.450	99,89
4	Belanja Perjalanan Dinas	724.361.600	703.480.025	97,12
4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	724.361.600	703.480.025	97,12
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.220.0000	2.150.000	96,85
5.1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	.220.000	2.150.000	96,85

Belanja Modal:

Kelompok Belanja Modal digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pada Tahun Anggaran 2023, tingkat capaian penyerapan Belanja Modal mencapai 95,31 persen; dimana dari Rp.58.817.310,- yang dianggarkan terealisasi sebanyak Rp.56.060.400,- Jumlah anggaran dan realisasi belanja Barang dan Jasa secara terinci disajikan pada tabel berikut ini:

No	Uraian	TA. 2023 (Rp)		Capaian (%)
		Anggaran	Realisasi	
C	BELANJA MODAL	58.817.310	56.060.400	95,31

1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<u>58.817.310</u>	<u>56.060.400</u>	<u>95,31</u>
1.1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.407.810	3.785.400	85,88
1.2	Belanja Modal Komputer	54.409.500	52.275.000	96,08

3.1.3 Pendapatan – LO

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO; beban; dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Operasional Pendapatan Daerah di Bapedalitbang pada tahun anggaran 2023 dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
A	PENDAPATAN DAERAH – LO	-	600.000	-600.000	-100,00
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	-	600.000	-600.000	-100,00
1.1	Retribusi Daerah-LO	-	600.000	-600.000	-100,00
1.1.1	Retribusi Jasa Usaha-LO	-	600.000	-600.000	-100,00
1.1.1.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	-	600.000	-600.000	-100,00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	-	600.000	-600.000	-100,00

Pada tabel di atas terlihat terjadi penurunan Pendapatan tahun 2023 sebesar 100% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022, terjadi pemindahan aset berupa Rumah Dinas dari Bappedalitbang ke BPKAD. Aset rumah dinas ini sebelumnya memiliki target PAD berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dan di tahun 2023 tidak lagi menjadi target Pendapatan Asli daerah.

3.1.4 Beban - LO

Uraian terhadap Beban Bapedalitbang pada Tahun Anggaran 2023 dan perbandingannya dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai tahun 2023 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 7,78 persen bila dibandingkan Beban Pegawai tahun 2022 lalu. Pos yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan adalah pada Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS, Beban Tunjangan Beras PNS dan Beban Gaji Pokok PNS. Secara keseluruhan, Beban Pegawai - LO Tahun 2023 dan perbandingan dengan Beban Pegawai - LO Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
A	BEBAN PEGAWAI	3.872.968.413	2.834.015.561	1.038.952.852	0,37
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	<u>2.638.177.977</u>	<u>2.490.515.561</u>	<u>147.662.416</u>	006
1.1	Beban Gaji Pokok PNS	1.851.524.738	1.806.621.410	44.903.328	2,49
1.2	Beban Tunjangan Keluarga PNS	189.988.500	177.578.317	12.410.183	6,99
1.3	Beban Tunjangan Jabatan PNS	200.928.125	208.515.000	-7.586.875	-3,64
1.4	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.395.000	42.600.000	10.205.00	-23,96
1.5	Beban Tunjangan Beras PNS	116.407.908	112.830.360	3.577.548	3,17
1.6	Beban Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	7.983.544	6.145.292	1.838.252	29,91
1.7	Beban Pembulatan Gaji PNS	55.787	22.213	33.574	151,15
1.8	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	143.220.602	121.438.923	21.781.679	17,94
1.9	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.296.117	3.690.974	605.143	16,40
1.9	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	12.888.424	11.073.072	1.815.352	16,39
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	<u>1.150.160.436</u>	<u>1.273.625.885</u>	<u>-123.465.449</u>	-9,69
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	<u>84.630.000</u>	<u>171.750.000</u>	<u>-87.120.000</u>	-50,72

Beban Barang dan Jasa – LO

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
B	BEBAN BARANG DAN JASA	2.122.365.839	2.260.001.398	-221.989.399	-0,10
1	Beban Barang	<u>449.293.183</u>	<u>672.825.339</u>	<u>-223.532.156</u>	-0,33
1.1	Beban Barang Pakai Habis	449.293.183	672.825.339	223.532.150	0,33
2	Beban Jasa	<u>803.481.058</u>	<u>515.590.627</u>	<u>287.980.431</u>	0,56
2.1	Beban Jasa Kantor	660.259.717	515.590.627	144.669.090	0,28
3	Beban Pemeliharaan	<u>133.010.000</u>	<u>124.578.820</u>	<u>8.431.180</u>	0,07
3.1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	119.290.000	40.516.760	78.773.240	0,94
3.2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.720.000	84.062.060	70.342.060	0,84
4	Belanja Perjalanan Dinas	<u>724.361.600</u>	<u>815.827.952</u>	<u>91.456.352</u>	-0,11
4.1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	724.361.600	815.827.952	91.456.352	-0,12
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	<u>2.220.000</u>	<u>206.067.500</u>	<u>-</u>	-0,11
5.1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.220.000	206.067.500	-	1

Pada tabel di atas terlihat bahwa Beban Barang dan Jasa - LO tidak mengalami peningkatan yang signifikan dimana hanya terjadi peningkatan sebesar 0,10 persen pada tahun 2023 bila dibandingkan beban pada tahun 2022 lalu.

3.1.5 Aset

Bila dibandingkan dengan total aset tahun 2023, jumlah aset Bapedalitbang sebesar Rp (56.851.658,67)- atau -0,93 % pada tahun 2023. Peningkatan ini karena terjadinya peningkatan asset tetap tahun 2022 yang berasal dari pos Peralatan dan Mesin, pos Gedung dan Bangunan serta pos Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
TOTAL ASET	5.759.758.642,31	6.080.786.789,00	28.992.954,33	-0,48
ASET LANCAR	0,00	11.142.314,00	0,00	-0,00
Kas di Bendahara	0,00	0,00	0,00	-
Pengeluaran				
Persediaan	2.698.200,00	4.462.000,00	1.736.800,00	-59,95
ASET TETAP		5.984.286.362,00	-32.450.265,67	-0,54
Tanah	546.031.812,00	546.031.812,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.542.150.5727,09	3.389.569.511,00	96.520.500,91	2,85
Gedung dan Bangunan	5.776.436.511,00	5.776.436.511,00	-0,01	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	516.549.937,00	516.549.939,00	-0,23	0,00
Aset Tetap Lainnya	93.251.400,00	93.251.400,00	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(4.717.359.790,27)	(4.717.359.790,27)	-0,00	3,00
ASET LAINNYA	58.817.310	34.037.600,24	-18.870.257,00	-35,67
Tagihan Piutang Penjualan	0,00	0,00	0,00	0,00
Angsuran				
Tagihan Tuntutan	0,00	0,00	0,00	0,00
Perbendaharaan				
Tagihan Tuntutan Ganti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kerugian Daerah				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	390.248.602,24	390.248.602,24	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi	-390.248.602,00	-390.248.602,00	0,00	0,00
Aset Non Lancar Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	-0,00

Penjelasan Pos-Pos Aset pada Neraca:

- Kas di Bend. Penerimaan** **0,00** **0,00**
 Kas di Bend. Penerimaan NIHIL karena pada tahun 2023 tidak ada target pendapatan untuk Bapedalitbang.
- Kas di Bend. Pengeluaran** **277.193,00** **0,00**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Dengan sisa UYHD yang telah disetor ke kas daerah pada akhir tahun anggaran. Adapun sisa UYHD tahun 2023 sebesar Rp. 277.193,00 dan tahun 2022 sebesar Rp 1.149.178,00

3. Piutang 0,00 0,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Piutang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

4. Persediaan 2.698.200,00 4.462.000,00

Jumlah tersebut menggambarkan saldo Persediaan Barang Habis Pakai, Persediaan barang cetak dan barang ekstra komptabel per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Rincian persediaan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai	
		2023	2022
1	Alat Tulis Kantor	468.000	2.288.000
2	Alat Listrik dan Elektronik	925.200	1.984.000
3	Benda Pos	450.000	70.000
4	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	855.000	0
5	Bahan Cetak	-	0
6	Bahan Untuk Kegiatan Lainnya		120.000
J U M L A H		2.698.200	4.462.000

5. Peralatan dan Mesin 3.542.150.572,09 3.486.090.172,09

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada Bapedalitbang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Terjadi perubahan nilai aset peralatan dan mesin karena adanya pembelian barang modal sebesar Rp. 56,060.400,00

Saldo Awal Per 1 Januari 2023 3.542.150.572,09

Penambahan Peralatan dan Mesin

Belanja Modal	56.060.400,00	
Atribusi Penunjang	0,00	
Hibah diterima	0,00	
Mutasi antar OPD	0,00	
Reklasifikasi	0,00	+
Jumlah penambahan		56.060.400,00

Pengurangan Peralatan dan Mesin

	<div> <div>Penghapusan (0.00)</div> <div>Hibah diberikan (0.00)</div> <div>Mutasi antar OPD (0.00)</div> <div>Reklasifikasi (0.00)</div> <div>Ekstra Komptabel (0.00) +</div> <div> Jumlah Pengurangan <div>(0.00) +</div> </div> </div> <div> Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 <div>3.542.150.572,09</div> </div>
6. Tanah	<div> 546.031.812,00 546.031.812,00 </div> <p>Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada Bapedalitbang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan asset tanah.</p>
7. Gedung dan Bangunan	<div> 5.776.436.511,00 5.776.436.511,00 </div> <p>Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada Bapedalitbang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.</p> <div> Saldo Awal Per 1 Januari 2023 <div>5.776.436.511,01</div> </div> <div> Penambahan Gedung dan Bangunan <div> <div> <div>Belanja Modal 0.00</div> <div>Atribusi Penunjang 0.00</div> <div>Hibah diterima 0.00</div> <div>Mutasi antar OPD 0,00</div> <div>Reklasifikasi 0.00 +</div> <div> Jumlah penambahan <div>0,00</div> </div> </div> </div> </div> <div> Pengurangan Gedung dan Bangunan <div> <div> <div>Penghapusan (0.00)</div> <div>Hibah diberikan (0.00)</div> <div>Mutasi antar OPD (0,00)</div> <div>Reklasifikasi (0.00)</div> <div>Ekstra Komptabel (0.00) +</div> <div> Jumlah Pengurangan <div>(0.00) +</div> </div> </div> </div> </div> <div> Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 <div>5.776.436.511,01</div> </div>
8. Jalan, Irigasi dan Jaringan	<div> 516.549.937,00 516.549.937,00 </div> <p>Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, jembatan, irigasi dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada Bapedalitbang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.</p>

	Saldo Awal Per 1 Januari 2023	516.549.937,23
	Penambahan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	
	Belanja Modal	0.00
	Atribusi Penunjang	0.00
	Hibah diterima	0.00
	Mutasi antar OPD	0,00
	Reklasifikasi	0.00 +
	Jumlah penambahan	0,00
	Pengurangan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	
	Penghapusan	(0.00)
	Hibah diberikan	(0.00)
	Mutasi antar OPD	(0.00)
	Reklasifikasi	(0.00)
	Ekstra Komptabel	(0.00) +
	Jumlah Pengurangan	(0.00) +
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	516.549.937,23
9.	Aset Tetap Lainnya	5.757.060.442,07 5.701.000.042,27
	Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada Bapedalitbang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Tidak terjadi perubahan nilai aset tetap lainnya pada tahun 2023.	
10.	Akumulasi Penyusutan	(4.717.359.790,27) (4.434.073.470,27)
	Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada Bapedalitbang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Nilai akumulasi penyusutan tersebut merupakan angka sementara karena belum dilakukan pembahasan/ rekonsiliasi dengan Bidang Pengelolaan BMD.	
11.	Aset Tidak Berwujud	390.248.602,24 390.248.602,24
	Jumlah tersebut merupakan nilai aset tidak berwujud berupa software (perangkat lunak komputer) yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada Bapedalitbang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Tidak terjadi perubahan nilai aset tidak berwujud pada tahun 2023.	
12.	Aset Lain-Lain	0,00 34.037.600,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai aset lain-lain berupa peralatan yang rusak berat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada Bapedalitbang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Tidak ada perubahan nilai aset tidak berwujud pada tahun 2023.	

3.1.6 Kewajiban

Uraian terhadap Kewajiban Bapedalitbang pada Tahun Anggaran 2023 dan perbandingannya dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
KEWAJIBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00	-0,00	-0,00
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	0,00	0,00	-	0,00
Utang Bunga Denda dan Commitment Fee	0,00	0,00	-	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	-	0,00
Utang Beban	0,00	0,00	-	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	-0,00	0,00

3.1.7 Ekuitas Dana

Uraian terhadap Ekuitas Dana Bapedalitbang pada Tahun Anggaran 2023 dan perbandingannya dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
EKUITAS	6.044.151.562,00	6.650.191.099,00	606.039.537,00	-9,11
Ekuitas	6,004.151.562,00	6.650.191.099,00	606.039.537,00	-9,11

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penetapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas; untuk Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

BAB IV	<p>PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</p> <p>4.1. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>Kabupaten Pesisir Selatan terletak di ujung paling selatan Provinsi Sumatera Barat; dilalui jalur lintas barat Sumatera; dan berada di persimpangan strategis menuju Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi. Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak di titik 0o 57; 31; 21;; LS – 20 28; 42; 32;; LS dan 1000 17; 48; 64 BT – 1010 17; 34; 3 BT; dengan luas \pm 6.049.34 km²; atau 14; 22 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah ini; maka Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Barat. Panjang garis pantai Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 220 kilometer; membentang dari perbatasan dengan Kota Padang di utara; sampai ke perbatasan dengan Provinsi Bengkulu di Selatan.</p> <p>Letak Kabupaten Pesisir Selatan di sisi Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia; di sisi Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok; Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Di sisi Utara berbatasan dengan Kota Padang; serta di sisi Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Painan sebagai Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan; berjarak 78 kilometer dari Kota Padang; atau sejauh 102 kilometer dari Bandara Internasional Minangkabau. Jarak tempuh Painan ke Bandara BIM dapat ditempuh dengan perjalanan darat dalam waktu kurang dari 3 jam.</p> <p>Secara administratif; Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 wilayah kecamatan dan 182 wilayah nagari. Jumlah nagari (nama lain dari desa) yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan; adalah yang terbanyak diantara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>Secara demografis, berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2020, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 sebesar 504.418 jiwa, yakni setara dengan 9,11% dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 2021, terjadi peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan menjadi 509.618 jiwa atau setara dengan 9,13% dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>Bila dibandingkan dengan penduduk kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, maka jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan menempati posisi ketiga terbanyak, setelah Kota Padang dan Kabupaten Agam.</p>
---------------	---

4.2. Kondisi Perekonomian Makro Tahun 2022**A. Kondisi Perekonomian Nasional**

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap dinamika perekonomian nasional pada tahun 2020 dan tahun 2021. Perekonomian yang semula terus memperlihatkan tren positif semenjak krisis ekonomi Tahun 1998, tiba-tiba berkontraksi cukup tajam di Tahun 2020 sebesar -2,07 persen. Menyikapi hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar perekonomian kembali *reborn* di tahun 2021, termasuk fokus pada upaya penekanan penyebaran COVID-19 yang akan berimbas pada mulai pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat. Kerja keras ini telah memperlihatkan hasil yang positif dimana sampai pertengahan tahun ini beberapa indikator kunci kesejahteraan masyarakat telah menunjukkan kinerja yang terus membaik.

Pada awal November tahun 2021, BPS merilis kondisi perekonomian nasional kuartal ketiga 2021, yang memperlihatkan adanya perkembangan yang menggembirakan. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2021 mencapai Rp. 4.325,4 triliun atau atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 2.815,9 triliun. Dari sisi pertumbuhannya, ekonomi Indonesia triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 (y-on-y) tumbuh sebesar 3,51 persen.

Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,06 persen; diikuti Pertambangan dan Penggalan sebesar 7,78 persen; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 5,51 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 3,68 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,31 persen dan 5,16 persen.

Secara spasial pada triwulan III-2021, struktur perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,55 persen; Pulau

Sumatera sebesar 21,95 persen; Pulau Kalimantan sebesar 8,32 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,98 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,75 persen; dan Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,45 persen. Pandemi COVID-19 gelombang kedua mencetuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama triwulan III-2021 yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi di sejumlah kelompok pulau. Pertumbuhan ekonomi (y-on-y) kelompok provinsi menurut pulau secara berturut-turut yaitu Pulau Maluku dan Papua tumbuh sebesar 9,15 persen; Pulau Sulawesi 4,58 persen; Pulau Kalimantan 4,52 persen; Pulau Sumatera 3,78 persen; dan Pulau Jawa 3,03 persen. Sementara itu, kelompok provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,09 persen.

Variabel lain yang meningkat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM di Indonesia terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2016, status pembangunan manusia Indonesia meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2010–2021 IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,76 persen per tahun, dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 72,29 pada tahun 2021. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, peningkatan IPM Indonesia sudah kembali membaik pada tahun 2021 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita (yang disesuaikan).

Kemudian juga terjadi perbaikan pada sektor ketenagakerjaan dimana pada Agustus 2021, TPT laki-laki sebesar 6,74 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,11 persen. TPT laki-laki mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020 dan Februari 2021, masing-masing sebesar 0,72 persen poin dan 0,07 persen poin. Sementara TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 0,35 persen poin dibandingkan Agustus 2020 dan mengalami kenaikan sebesar 0,70 persen poin dibandingkan Februari 2021.

Pandemi COVID-19 berdampak terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Pandemi COVID-19 membuat sebagian penduduk kehilangan atau berhenti bekerja dan menjadi pengangguran atau Bukan Angkatan Kerja (BAK). Pandemi COVID-19 juga membuat sebagian penduduk menjadi sementara tidak bekerja atau mengalami pengurangan jam kerja.

Adapun penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 berdasarkan hasil Sakernas dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: (1) Pengangguran karena COVID-19; (2) Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19; (3) Sementara tidak bekerja karena COVID-19; dan (4) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Kondisi (1) dan (2) merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi (3) dan (4) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang masih bekerja.

Upaya penurunan angka kemiskinan juga memperlihatkan kinerja positif. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Dibandingkan September 2020, jumlah penduduk miskin menurun 0,01 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,12 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 tercatat sebesar 10,14 persen, menurun 0,05 persen poin terhadap September 2020 dan meningkat 0,36 persen poin terhadap Maret 2020. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2020–Maret 2021, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 138,1 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 145,0 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,88 persen menjadi 7,89 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,20 persen menjadi 13,10 persen.

Indikasi lain yang memperlihatkan perbaikan perekonomian nasional di tahun 2021 adalah kondisi ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Meskipun perubahan yang terjadi tidak begitu signifikan namun hal ini tetap perlu diapresiasi. Pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur melalui Gini Ratio adalah sebesar 0,384. Angka ini menurun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,385 dan meningkat 0,003 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,381.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,76

persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2021 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,81 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,68 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

B. Kondisi Perekonomian Sumatera Barat

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menekan laju pertumbuhan perekonomian daerah yang berkontraksi sekitar -1,6%. Walaupun kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan bahkan dunia, kontraksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 masih lebih baik dari nasional pada angka -2,07%. Pertumbuhan PDRB per kapita pun berkontraksi ke angka Rp. 30,64 juta dari tahun 2019 pada angka Rp. 31,67 juta. Sementara itu tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat cenderung stabil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak terlalu terpengaruh oleh COVID-19. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai angka 3,29%. Hingga data terkini di triwulan I 2022 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat pada angka 3,64% jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2021. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi dalam 4 triwulan terakhir dibandingkan dengan 4 triwulan sebelumnya mencapai angka 4,25%. Dari sisi ketimpangan, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan *Gini Ratio* walaupun cenderung mengalami penurunan secara lambat dalam 5 tahun terakhir justru mengalami tren positif yang menurun 0,001 poin ke angka 0,300 pada tahun 2021 yang lalu. Pandemi COVID-19 justru menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. Angka ketimpangan ini berada di bawah angka Gini Ratio Nasional pada kisaran 0,381 yang menunjukkan bahwa baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada pada tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang. Sedangkan dari sisi ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson, dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung meningkat dari 0,266 ke angka 0,274. Kondisi pandemi COVID-2019 memperparah ketimpangan wilayah hingga

angkanya naik menjadi 0,314. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga ketimpangan wilayah ini bertahan di angka 0,315.

Untuk aspek kemiskinan dan pengangguran, kondisi pandemi COVID-19 menambah jumlah penduduk miskin baru sebanyak 16,57 ribu jiwa sehingga meningkatkan angka kemiskinan dari 6,40% menjadi 6,56%. Jumlah pengangguran pun bertambah 44,85 ribu orang, meningkat dari 5,33% menjadi 6,88%. Secara umum berdasarkan karakteristik wilayah kemiskinan cenderung berada di kawasan perdesaan dan pengangguran berada di kawasan perkotaan. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang lebih berdampak di kawasan perkotaan menyebabkan peningkatan angka pengangguran lebih tinggi dari peningkatan angka kemiskinan. Pemulihan ekonomi di tahun 2021 berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,04% dan angka pengangguran menjadi 6,52%. Perkembangan awal tahun 2022 di bulan Februari tercatat tingkat pengangguran kembali turun ke angka 6,17%.

C. Kondisi Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan

Kebijakan dalam penanganan pandemi kini mulai terasa hasilnya. Upaya penguatan dari hulu hingga hilir telah berhasil menekan laju penyebaran virus Covid-19. Terlihat dari turunnya kasus aktif di Indonesia, terutama di Kabupaten Pesisir Selatan tidak terdengar lagi adanya kasus Covid-19. Walaupun demikian, pandemi covid-19 masih menjadi tantangan utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Penanganan pandemi Covid-19 pun menjadi kunci agar aktivitas perekonomian bisa berjalan dengan baik.

Pada tahun 2021, PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku mencapai 14.927,57 milyar rupiah. Secara nominal, terjadi peningkatan sebesar 831,6 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di berbagai lapangan usaha dan faktor inflasi. Selain itu, PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga konstan 2010 juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dari 9.470,78 milyar rupiah menjadi 9.790,36 milyar rupiah. Kenaikan PDRB atas dasar harga

konstan ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di berbagai lapangan usaha tanpa adanya pengaruh inflasi. Besar peranan setiap lapangan usaha dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi setiap lapangan usaha.

Selama periode lima tahun terakhir (2017-2021), struktur perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Industri Pengolahan; serta Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari distribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku.

Kontributor terbesar pembentukan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku tahun 2021 adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencapai 37,22 persen. Kontribusinya terus menurun dari 40,20 persen pada tahun 2017. Pada urutan kedua adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,89 persen. Peranannya meningkat dari 11,81 persen pada tahun 2017. Pada urutan ketiga adalah lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,59 persen.

Selama periode 2017-2021, hanya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang terus menurun diantara 17 kategori lapangan usaha yang ada. Sebaliknya, lapangan usaha Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terus berangsur meningkat. Sementara itu, peranan 12 kategori lapangan usaha lainnya terus berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Meskipun kinerja pertumbuhan perekonomian mulai membaik, namun belum diiringi dengan peningkatan kinerja penurunan kemiskinan. Meningkatnya angka kemiskinan dari 7,61 tahun 2020 menjadi 7,92 pada 2021 masih menjadi pekerjaan rumah untuk ke depannya. Di lain sisi adanya penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

	<p>menjadi 5,97% tahun 2021 dari 7% tahun 2022, tentu saja tidak serta merta membuat terlena dalam upaya-upaya peningkatan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan perkembangan kondisi kekinian di Kabupaten Pesisir Selatan, maka berikut prediksi indikator makro daerah untuk tahun 2023.</p> <p>Pemerintah dapat tetap mengejar target pertumbuhan ekonomi dengan fokus menyusun strategi yang tepat terhadap sektor-sektor yang berkontribusi besar bagi roda perekonomian.</p> <p>Adapun strategi dan arah kebijakan ekonomi kabupaten Pesisir Selatan dapat dirumuskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, dalam hal ini semua yang berhubungan dengan sektor ini baik yang berhubungan dengan kelembagaannya, akses pembiayaan usaha pertanian serta akses distribusi logistik dan perbaikan tata distributornya serta semua hal yang terkait dengan peningkatan nilai tambah produksi pertanian. 2. Terus meningkatkan sektor ekonomi kecil dan menengah (UMKM) dengan pendampingan terhadap produk, keamanan, infrastruktur dan standar sehingga UMKM yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan bisa berdaya saing. 3. Terus mengoptimalkan pengembangan destinasi sektor pariwisata. Dalam hal ini termasuk atraksi, akses dan amenitasnya. Salah satu peningkatan pendapatan daerah adalah dari sektor pariwisata. Dengan telah menurunnya wabah Covid-19 ini dan tidak ada lagi pembatasan berskala besar terhadap Kabupaten Pesisir Selatan, maka hal ini menjadi salah satu faktor yang memudahkan akses bagi wisatawan untuk berkunjung ke daerah wisata Pesisir Selatan. Oleh karena itu disini lah peran pemerintah untuk lebih meningkatkan segala hal yang dapat untuk menunjang pengembangan destinasi wisata ini. 4. Terus berupaya menjaga optimisme investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pesisir selatan. Dalam hal ini fungsi investor sangat banyak pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Pesisir Selatan. Hal
--	---

ini bisa jadi dari segi penggunaan tenaga kerja untuk pabrik-pabrik atau perkantoran swasta yang akan didirikan oleh investor atau dari segi penanaman modal untuk penambahan modal usaha dan dalam bentuk kerjasama lainnya.

5. Meningkatkan semangat wirausaha, sehingga setiap sumber daya manusia yang produktif dapat berdaya guna, Hal ini juga sebagai salah satu upaya dalam hal mengatasi pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan.
6. Meningkatkan kegiatan yang berguna untuk mengoptimalkan inovasi dan kerjasama dalam hal inovasi.

Selain itu, naiknya harga karet dan sawit berdampak juga pada peningkatan ekonomi masyarakat yang sebelumnya mengalami penurunan harga karet dan sawit yang cukup signifikan. Naiknya perekonomian daerah secara tidak langsung berdampak pada turunnya tingkat pengangguran terbuka dari target awal 71,10 persen terkoreksi menjadi 6,85 persen.

4.3. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026

Secara umum Visi; Misi; Tujuan dan Sasaran jangka menengah daerah kabupaten Pesisir selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Visi RPJMD Tahun 2021-2026

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tahun 2021-2024; maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA; MAJU;
DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG
AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan; serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

	<p>Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi; sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik; didukung sumber daya manusia yang unggul; profesional; berperadaban tinggi; berdaya saing; berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.</p> <p>Bermatabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur; mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak; Syarak Basandi Kitabullah).</p> <p>Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.</p> <p>Profesional : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik; yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik; semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi; kolusi dan nepotisme)</p> <p>Misi RPJMD Tahun 2021 - 2026</p> <p>Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026; yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera; maju; dan bermatabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan kedepan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih; efektif; demokratis dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat 3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor
--	--

potensi dan unggulan daerah.

4. Mewujudkan. Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman; kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman; tentram dan dinamis.

Penjelasan dan penjabaran masing-masing Misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama:

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih; Efektif; Demokratis dan Transparan.

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu: (1) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; (2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur; (3) Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini lahir dari adanya tuntutan kebutuhan masyarakat akan layanan birokrasi yang bersih; berkinerja tinggi dan pelayanan publik yang berkualitas.

Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja yang dimaksud dalam misi ini yaitu adanya saluran-saluran yang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi; mengawasi dan memberi umpan balik terhadap setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintahan; peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung *open government* pada seluruh instansi pemerintah daerah.

2. Misi Kedua:

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang menentukan peningkatan kualitas hidup masyarakat; yaitu: (1) peningkatan derajat kesehatan; dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini lahir dari adanya cita-cita untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan perlindungan sosial lainnya bagi masyarakat ekonomi lemah.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat terkait dengan kualitas kesehatan masyarakat dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Karena itu perlu untuk terus mendorong

pemenuhan dan peningkatan tenaga kesehatan; sarana pelayanan primer (Puskesmas; klinik dan dokter praktek mandiri); pemenuhan prasarana pendukung (alat kesehatan; obat; dan perbekalan kesehatan lainnya); serta inovasi untuk pelayanan daerah terpencil.

Upaya ini tentu dilakukan dengan terus mendorong upaya-upaya promotif dan preventif secara masih dan terstruktur.

Di sisi lain; upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah; akan terus didorong sehingga beban hidup masyarakat dapat dikurangi.

3. Misi Ketiga:

Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.

Pada misi ini terdapat hal-hal strategis yang perlu menjadi kata kunci antara lain: (1) komoditi unggulan; (2) mengoptimalkan industri pengolahan; (3) pemetaan potensi (4) pelestarian lingkungan hidup dan kawasan lindung; dan (5) pembangunan infrastruktur.

Keberlimpahan potensi daerah; khususnya lahan yang subur untuk pertanian seharusnya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan produk-produk yang mendorong meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena itu dibutuhkan kebijakan yang benar-benar fokus pada pengembangan komoditi yang sesuai dengan keunggulan kompetitif daerah sehingga sektor pertanian dapat ditingkatkan lagi daya ungkitnya bagi kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain upaya untuk memperbesar nilai produksi komoditi sektor pertanian (pertanian; peternakan; perikanan dan kehutanan); yang tidak kalah penting adalah bagaimana memaksimalkan nilai tambah dari komoditi tersebut melalui pengembangan sistem budidaya produksi hulu-hilir yang tertata; terorganisir dan terpadu.

Pada tataran inilah konsep hilirisasi dan industrialisasi harus dijadikan arus utama pengembangan perekonomian daerah. Karena itu; ke depan pemerintah daerah akan mendorong terwujudnya keterpaduan antara upaya peningkatan produksi budidaya dengan peningkatan produk-produk turunannya yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

Sejalan dengan upaya peningkatan nilai tambah komoditi; pemerintah daerah juga akan mencoba untuk meminimalkan *production*

cost akibat ekonomi berbiaya tinggi yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing produk yang dihasilkan. Pemerintah daerah akan mengupayakan pemenuhan dan pemerataan infrastruktur penunjang perekonomian di seluruh wilayah seperti; konektifitas; penyediaan sumber air; jalan-jalan produksi dan sarana-prasarana lain yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang lebih penting; untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan kekayaan alam dan potensi yang berlimpah ini maka setiap upaya pembangunan harus dilakukan dengan selalu menjaga kelestarian lingkungan.

4. Misi Keempat

Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan

Pada misi keempat ini terdapat dua kata kunci (1) Wisata yang Nyaman berkesan; dan (2) Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkontribusi bagi kesejahteraan.

Membangun sektor pariwisata; tidak bisa dilepaskan dengan membangun manusia. Paradigma yang selama ini beranggapan bahwa membangun pariwisata itu lebih terfokus pada pembangunan destinasi dan infrastruktur saja perlu digeser kepada paradigma baru bahwa fokus utama pembangunan pariwisata itu adalah pembangunan manusianya (pelakunya). Oleh karena itu arah pengembangan kepariwisataan ke depan lebih dititikberatkan kepada pembenahan manajemen pengelolaan destinasi; penguatan peran pentahelix dan pemberdayaan masyarakat pelaku wisata.

Ke depan; Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi berfokus pada upaya menjual keindahan alam semata; namun akan ditingkatkan pada upaya menjual keunikan ragam budaya; keramahtamahan masyarakat; kenyamanan destinasi dan kreatifitas masyarakat dan generasi muda. Karena itu kedepannya akan diberikan perhatian yang lebih kepada upaya pemberdayaan masyarakat pelaku wisata; pengembangan potensi kekayaan budaya dan kearifan lokal serta memperkuat peran nagari dalam memanfaatkan peluang daya ungkit pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata ini.

Dengan semakin meningkatnya kualitas masyarakat yang mengamalkan Sapta Pesona; maka wisatawan yang berkunjung akan

merasa nyaman dan terkesan sehingga dapat tinggal lebih lama dan akan berkunjung kembali ke Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga harapan bahwa Pesisir Selatan menjadi daerah wisata favorit yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dapat terwujud.

5. Misi Kelima

Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman; Kreatif dan Berdaya Saing

Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang nilainya sangat strategis; yaitu: (1) pendidikan yang berkualitas; dan (2) sumber daya manusia yang beriman; kreatif dan berdaya saing.

Pendidikan yang berkualitas; murah dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat; menjadi target yang ingin diwujudkan pada misi ini; sehingga keadaan dimana iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia; kreatifitas; inovasi; wawasan kebangsaan; kecerdasan; kedisiplinan; rasa tanggung jawab; kreatifitas dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dicapai.

Dengan menekankan upaya pembenahan pada sisi tenaga pendidik dan sisi peserta didik secara berimbang; maka diharapkan sistem pendidikan yang dibangun dapat melahirkan insan-insan yang religius; cerdas; berakhlak dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Misi ini juga menjadi ikhtiar Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyambut datangnya bonus demografi.

6. Misi Keenam

Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tentram dan Dinamis

Pada misi keenam ini terdapat dua kata kunci yaitu (1) masyarakat yang aman dan tentram; dan (2) komunikasi yang harmonis dan dinamis antar lembaga.

Pembangunan suatu daerah akan berjalan dengan baik dan optimal serta memberikan nilai tambah positif apabila masyarakatnya berada dalam kondisi aman dan tenteram. Kondisi aman dan tentram inilah yang akan coba diwujudkan agar selalu tercipta dalam masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan; dengan tujuan agar seluruh masyarakat menjadi Bahagia. Karena itu akan diupayakan untuk meminimalkan terjadinya konflik horizontal; perselisihan keluarga/ rumah tangga; kenakalan remaja; kekerasan pada anak dan perempuan.

Untuk mewujudkan keamanan; ketentraman dan kebahagiaan masyarakat tentu perlu sinergi yang harmonis seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah; DPRD; unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; Organisasi kemasyarakatan serta para tokoh agama dan pemangku adat.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

B. Tujuan Umum

Sesuai visi dan misi RPJMD tahun 2021-2026 diatas; Pemerintah Daerah menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus membaik sehingga pada tahun 2026 mencapai angka 71;68 sehingga Pesisir Selatan kembali masuk dalam daerah yang memiliki IPM berkategori tinggi. IPM ini terdiri dari empat komponen pembentuknya yaitu: (a) Usia Harapan Hidup; (b) Rata-Rata Lama Sekolah; (c) Harapan Lama Sekolah; dan (d) Pengeluaran perkapita.

Perekonomian daerah diharapkan terus membaik dan meningkat secara konsisten dengan laju pertumbuhan rata-rata 3;92 % pertahun. Hal ini sejalan dengan proyeksi target nilai PDRB yang mengalami peningkatan dari Rp.9;470 triliyun di tahun 2020 menjadi Rp.11;923 triliyun pada akhir tahun 2026. Sementara itu; Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan mengalami penurunan dari 7;00% di tahun 2020 menjadi 6;30 % pada tahun 2026. Begitu juga dengan Tingkat Kemiskinan yang diharapkan terus ditekan; dimana semula 7;61% tahun 2020 hingga mencapai 7;16 % pada akhir periode RPJMD. Hal ini sejalan dengan harapan terjadinya pemerataan kesejahteraan yang terus membaik yang ditandai dengan penurunan Indeks Gini dari 0;249 diawal RPJMD menjadi 0;233 diakhir tahun 2026.

Target dan proyeksi indikator makroekonomi dan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai sebagaimana tersaji pada Tabel berikut ini.

Proyeksi Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Awal		Target RPJMD Tahunan				
		Baseline	Outlook					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indek Pembangunan Manusia	69;90	70;06	70;21	70;59	70;98	71;39	71;68
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	7;06	71;04	71;22	71;39	71;57	71;74	71;92
	- Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8;260	8;29	8;32	8;35	8;38	8;40	8;43
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13;320	13;36	13;40	13;45	13;49	13;53	13;57
	- Pengeluaran Perkapita (ribu Rp/org /thn)	9.212	9.325	9.369	9.534	9.734	9.949	10.182
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1;11	2;55	2;89	4;17	4;52	4;62	4;75
3	PDRB harga konstan (Rp.Triliun)	9;470	9;711	9;992	10;409	10;879	11;382	11;923
4	Indek Gini	0;249	0;25	0;25	0;25	0;25	0;25	0;25
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7;00	6;93	6;85	6;73	6;61	6;46	6;30
6	Tingkat Kemiskinan (%)	7;61	7;79	7;67	7;55	7;42	7;29	7;16

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

C. Tujuan Pembangunan Sesuai Misi

Memperhatikan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dijabarkan diatas; maka tujuan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam periode 2021-2026 adalah:

Misi Pertama : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih; Efektif; Demokratis dan Transparan

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi pertama adalah:

Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi

Penguatan terhadap tata kelola pemerintahan diharapkan dapat mewujudkan reformasi birokrasi dan semakin tingginya kinerja pemerintahan. Keberhasilan dari tujuan ini dicerminkan dengan semakin membaiknya indikator kinerja yaitu **Indeks Reformasi Birokrasi** Kabupaten Pesisir Selatan yang ditargetkan tahun 2026 bernilai 65 atau katogori (B).

Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Terdapat 2 (dua) Tujuan yang hendak dicapai dalam misi kedua ini yaitu:

Tujuan 1:

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tujuan pertama yang ingin dicapai dari misi ini yaitu terjadinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan

dari waktu-ke waktu. Keberhasilan dari tujuan ini dicerminkan dengan indikator kinerja yaitu; meningkatnya **Usia Harapan Hidup** masyarakat yang ditargetkan tahun 2026 menjadi 71;92 tahun.

Tujuan 2:

Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan kedua yang ingin diwujudkan pada misi ini yaitu semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Keberhasilan dari tujuan ini dicerminkan dengan dua indikator kinerja yaitu; berkurangnya persentase masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan (**Tingkat Kemiskinan**) yang ditargetkan tahun 2026 sebesar 7;16 persen.

Misi Ketiga	: Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah
--------------------	---

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ketiga adalah :

Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan

Penguatan fundamental dan kemandirian ekonomi daerah; dengan mendorong sektor-sektor potensial dan unggulan daerah diharapkan dapat mampu meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Keberhasilan dari tujuan ini dicerminkan dengan indikator kinerja yaitu:

- Semakin meningkatnya **nilai PDRB Kabupaten Pesisir Selatan** (atas dasar harga konstan) yang ditargetkan tahun 2026 sebesar Rp11;923 triliun.
- Semakin menurunnya tingkat ketimpangan dengan mempertahankan **Indeks Gini** di 0;233 pada tahun 2026

Misi Keempat	: Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan
---------------------	---

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi keempat adalah :

Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Upaya untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah

tujuan wisata yang nyaman dan berkesan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dari tujuan ini dicerminkan dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya **Jumlah Serapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif** dengan target 7.200 orang; pada tahun 2026.

Misi Kelima : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman; Kreatif dan Berdaya Saing

Terdapat 2 (dua) Tujuan yang hendak dicapai dalam misi kelima ini yaitu:

Tujuan 1:

Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas

Tujuan pertama yang ingin diwujudkan dari misi ini yaitu untuk mewujudkan dunia Pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Pesisir Selatan. Keberhasilan dari tujuan ini dicerminkan dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya **Persentase Pemenuhan 8 (delapan) Standar Mutu Pendidikan** yang ditargetkan tahun 2026 sebesar 21,34 persen.

Tujuan 2:

Terwujudnya SDM yang Beriman; Kreatif dan Berdaya Saing

Tujuan kedua yang ingin dicapai pada misi ini yaitu agar terwujudnya sumber daya manusia Pesisir Selatan yang beriman; kreatif dan berdaya saing. Keberhasilan dari tujuan ini dicerminkan dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya skor **Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Bidang SDM** yang ditargetkan tahun 2026 memiliki nilai sebesar 3,8 dengan kategori sangat tinggi.

Misi Keenam : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman; Tenram dan Dinamis.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi keenam adalah:

Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman; Tenram dan Dinamis

Misi ini dilaksanakan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman; tenram dan dinamis dan penuh kerukunan. Keberhasilan dari tujuan ini dicerminkan dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya

Indek Kebahagiaan Masyarakat Pesisir Selatan yang ditargetkan tahun 2026 mencapai 75;92.

SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran strategis atau selanjutnya disebut sasaran; merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan; yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka menengah yang bersifat menyeluruh; serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan; maka ditetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai untuk setiap misi dan tujuan jangka menengah sebagai berikut:

I. Misi Pertama:

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih; Efektif; Demokratif dan Transparan

Tujuan:

1.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi

Sasaran:

1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja.

Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi diharapkan dapat meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah; ditargetkan WTP setiap tahun.
- Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP); diupayakan mengalami perbaikan dengan target skor 65 atau BB.

	<ul style="list-style-type: none"> - Skor Nilai LPPD akan ditingkatkan dengan target nilai mencapai 3;215. - Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah mengalami perbaikan dan ditargetkan dapat mencapai skor 3;2 pada Level 3. <p>1.1.2Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi</p> <p>Upaya peningkatan kapabilitas birokrasi merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi agar efektifitas dan profesionalitas aparatur dan lembaga pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu; kemajuan teknologi; khususnya teknologi informasi diharapkan menjadi <i>tools</i> dan <i>booster</i> bagi percepatan peningkatan kapasitas birokrasi melalui penyelenggaraan sistem pemerintaahan berbasis elektronik.</p> <p>Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kelembagaan Pemerintahan Daerah; ditargetkan mencapai P-5 atau katogari sangat efektif. - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditargetkan mencapai nilai 3;90. - Indeks Profesionalitas ASN terus meningkat dan ditargetkan mencapai nilai 85. - Indeks Inovasi Daerah ditargetkan mengalami peningkatan hingga mencapai nilai 10.500. <p>1.1.3Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik</p> <p>Keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang prima adalah tuntutan zaman di era teknologi informasi. Dengan semakin transparannya informasi bagi masyarakat dan semakin berkualitas pelayanan publik maka pengimplementasian reformasi birokrasi akan berjalan lebih baik sesuai harapan.</p> <p>Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
--	--

	<p>pemerintah daerah terus mengalami perbaikan dan ditargetkan mencapai nilai 85;00.</p> <p>Keterbukaan Informasi Publik semakin baik; ditargetkan mencapai nilai 95 dengan kategori sangat informatif.</p> <p>II. Misi Kedua:</p> <p>Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat</p> <p>Tujuan:</p> <p>2.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan</p> <p>Sasaran:</p> <p>2.1.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat</p> <p>Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka Pemerintah Daerah akan berupaya dan fokus pada upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini ditandai dengan semakin kecilnya angka kematian bayi; angka kematian ibu; menurunnya angka kesakitan dan prevalensi stunting.</p> <p>Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angka Kematian Bayiditargetkan dapat dipertahankan tidak lebih dari 8 per-1.000 kelahiran hidup. - Angka Kematian Ibu mengalami penurunan danditargetkan mencapai 75 per 100.000 kelahiran hidup. - Angka Kesakitan masyarakat terus ditekan dengan target 14;84%. - Prevalensi stunting terus ditekan dan membaik dengan target 8;88%. <p>2.1.2 Meningkatnya Perlindungan Kesehatan Masyarakat</p> <p>Pemerintah Daerah akan mengupayakan pemenuhan cakupan perlindungan kesehatan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlayani hanya dikarenakan ketidakmampuannya secara ekonomi. Hal ini merupakan salah satu terobosan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan</p>
--	--

	<p>derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:</p> <p>Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan yang ditargetkan mencapai 100 persen.</p> <p>Tujuan:</p> <p>2.2 Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan</p> <p>Sasaran:</p> <p>2.2.1 Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat</p> <p>Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata; maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan jaring pengaman sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).</p> <p>Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar; ditargetkan sebesar 56,05 persen. <p>2.2.2 Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin</p> <p>Sasaran lain yang hendak dicapai dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat; terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini terutama untuk mencegah ketidakcukupan konsumsi pangan masyarakat.</p> <p>Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian skor pola pangan harapan mencapai bernilai 89. - Pengeluaran perkapita; ditargetkan mencapai Rp.10.182.000;- .
--	---

	<p>III. Misi Ketiga:</p> <p>Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Tujuan:</p> <p>3.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Sasaran:</p> <p>3.1.1 Meningkatkan Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri</p> <p>Dalam rangka mengakselerasi kemajuan; kemandirian dan pemerataan ekonomi; maka Pemerintah Daerah akan menumbuhkan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi baik yang berasal dari penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.</p> <p>Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai investasi swasta dan masyarakat; ditargetkan meningkat setiap tahun hingga terakumulasi sebesar Rp.2;5 trilyun. </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>3.1.2 Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan</p> <p>Kabupaten Pesisir Selatan memiliki keunggulan kompetitif pada sektor pertanian; kelautan dan perikanan. Kedepanya Pemerintah Daerah akan memaksimalkan produksi komoditi pada sektor unggulan ini dan lebih jauh akan mengupayakan peningkatan nilai tambahnya melalui hilirisasi komoditi.</p> <p>Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai PDRB Sektor Pertanian mengalami peningkatan dan ditargetkan Rp.4;11 trilyun. - Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan mengalami peningkatan dan ditargetkan menjadi Rp.761;87 milyar. </div>
--	--

3.1.3 Menurunnya Pengangguran

Pemerintah Daerah akan memperluas kesempatan kerja guna menekan angka pengangguran. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara merata.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka yang ditargetkan menjadi 6;30 persen.

3.1.4 Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan

Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi akan semakin cepat diwujudkan apabila infrastruktur penunjang bagi kegiatan ekonomi masyarakat tersedia secara merata. Infrastruktur yang memadai akan lebih mengefesienkan biaya produksi sehingga nilai tambah ekonomi akan semakin optimal.

Indikator dan target kinerja sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik mengalami peningkatan dengan targe mencapai 35.90 persen.
- Rasio Konektivitas ditargetkan mencapai 63 persen.
- Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik ditargetkan menjadi 66;70 persen.

3.1.5 Terjaminnya Kelestarian Lingkungan

Pembangunan disegala bidang harus diimbangi dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Hal ini untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi masa depan.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup membaik dan ditargetkan menjadi 88;15.

	<p>IV. Misi Keempat:</p> <p>Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan</p> <div data-bbox="384 349 1353 517"> <p>Tujuan:</p> <p>4.1 Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi Kesejahteraan Masyarakat</p> </div> <div data-bbox="384 517 1353 1312"> <p>Sasaran:</p> <p>4.1.1 Pesisir Selatan Menjadi Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia</p> <p>Kemajuan pariwisata disuatu daerah ditandai dengan banyaknya kunjungan dan lamanya wisatawan menetap. Semakin banyak dan semakin lama wisatawan berada di Pesisir Selatan; maka akan semakin besar perputaran uang masuk dari sektor pariwisata. Hal ini tentu bisa terwujud apabila Pesisir Selatan mampu menjadi salah satu destinasi wisata favorit.</p> <p>Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kunjungan wisatawan (nusantara dan asing);ditargetkan mencapai 2.073.600 orang. - Lama tinggal wisatawan ditargetkan meningkat menjadi 1;5 hari. </div> <div data-bbox="384 1312 1353 1480"> <p>Tujuan:</p> <p>4.2 Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi Kesejahteraan Masyarakat</p> </div> <div data-bbox="384 1480 1353 2018"> <p>4.2.1 Berkembangnya Ekonomi Kreatif</p> <p>Pada dasarnya ekonomi kreatif adalah bentuk aktivitas ekonomi yang mengutamakan kreatifitas berpikir sebagai modal utama dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang mempunyai nilai serta sifat komersial.Ekonomi kreatif sangat berperan dalam perekonomian suatu daerah terutama dalam menghasilkan pendapatan; menciptakan lapangan kerja;menambah kekayaan intelektual dan meningkatkan teknologi.</p> <p>Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada</p> </div>
--	---

	<div data-bbox="507 194 1340 336"> <p>akhir RPJMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai omset usaha ekonomi kreatif ditargetkan sebesar Rp. 50 Milyar. </div> <div data-bbox="435 358 1013 394"> <p>4.2.2. Berkembangnya Ekonomi Kreatif</p> </div> <div data-bbox="507 412 1340 819"> <p>Pada dasarnya ekonomi kreatif adalah bentuk aktivitas ekonomi yang mengutamakan kreatifitas berpikir sebagai modal utama dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang mempunyai nilai serta sifat komersial. Ekonomi kreatif sangat berperan dalam perekonomian suatu daerah terutama dalam menghasilkan pendapatan; menciptakan lapangan kerja; menambah kekayaan intelektual dan meningkatkan teknologi.</p> <p>Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai omset usaha ekonomi kreatif ditargetkan sebesar Rp. 50 Milyar. </div> <div data-bbox="435 1077 1013 1113"> <p>4.2.3 Berkembangnya Ekonomi Kreatif</p> </div> <div data-bbox="507 1131 1340 1538"> <p>Pada dasarnya ekonomi kreatif adalah bentuk aktivitas ekonomi yang mengutamakan kreatifitas berpikir sebagai modal utama dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang mempunyai nilai serta sifat komersial. Ekonomi kreatif sangat berperan dalam perekonomian suatu daerah terutama dalam menghasilkan pendapatan; menciptakan lapangan kerja; menambah kekayaan intelektual dan meningkatkan teknologi.</p> <p>Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai omset usaha ekonomi kreatif ditargetkan sebesar Rp. 50 Milyar. </div> <div data-bbox="392 1854 639 1890"> <p>V. Misi Kelima:</p> </div> <div data-bbox="454 1908 1340 1998"> <p>Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman; Kreatif dan Berdaya Saing</p> </div>
--	---

	<div data-bbox="387 188 1358 304"> <p>Tujuan:</p> <p>5.1 Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas.</p> </div> <div data-bbox="387 304 1358 913"> <p>Sasaran:</p> <p>5.1.1 Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan</p> <p>Agar pendidikan berkualitas dapat terwujud; maka Pemerintah Daerah perlu untuk mengupayakan agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan. Pemerintah harus memastikan tidak adalagi penduduk yang putus sekolah karena terkendala biaya.</p> <p>Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harapan Lama Sekolah; ditargetkan 13;57 tahun. - Rata-Rata Lama Sekolah; ditargetkan 8;43 tahun. </div> <div data-bbox="387 913 1358 1581"> <p>5.1.2 Meningkatnya daya saing Pendidikan</p> <p>Kondisi yang ingin diciptakan dengan pendidikan yang berdaya saing adalah meningkatnya prestasi peserta didik di Kabupaten Pesisir Selatan. Peningkatan prestasi peserta didik tidak terlepas dari upaya peningkatan mutu pendidikan di segala bidang.</p> <p>Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi ditargetkan sebanyak 14 orang. - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mengalami perbaikan dan ditargetkan menjadi 10;0682. </div> <div data-bbox="387 1581 1358 1744"> <p>Tujuan:</p> <p>5.2 Terwujudnya SDM yang Beriman; Kreatif dan Berdaya Saing</p> </div> <div data-bbox="387 1744 1358 2018"> <p>Sasaran:</p> <p>5.2.1 Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan Masyarakat</p> <p>Untuk mewujudkan SDM yang beriman; kreatif dan berdaya saing; maka Pemerintah Daerah akan mencoba meningkatkan</p> </div>
--	---

	<p>pengimplementasian nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat revitalisasi falsafah ABS-SBK yang akan di fokuskan pada generasi muda sebagai generasi penerus masa depan.</p> <p>Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid dan mushala; ditargetkan mencapai kategori tinggi. - Persentase masyarakat membayar zakat harta; ditargetkan mencapai 100 persen. <p>5.2.2 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kreatif dan Berdaya Saing</p> <p>Bonus demografi harus disiapkan dari sekarang; agar dimasa depan potensi penduduk berusia produktif dapat membawa kemajuan dan bukan menjadi sumber masalah. Karenaitulah perlu untuk mengembangkan kreatifitas dan jiwa kompetitif generasi muda.</p> <p>Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah prestasi pemuda tingkat provinsi dan nasional ditargetkan sebanyak 30 orang. - Jumlah wirausahawan yang berdaya saing terus berkembang dengan target sebanyak 80 orang. <p>VI. Misi Keenam:</p> <p>Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman; Tentram dan Dinamis</p> <p>Tujuan:</p> <p>6.1 Terciptanya Kondisi Masyarakat yang Aman; Tentram dan Dinamis</p> <p>Sasaran:</p> <p>6.1.1 Terwujudnya Keluarga Bahagia</p> <p>Dalam upaya menciptakan kondisi masyarakat Pesisir Selatan</p>
--	--

yang aman; tentram dan dinamis; maka Pemerintah Daerah akan melakukan pendekatan-pendekatan melalui sentuhan terhadap keluarga. Hal ini akan terwujud dengan meningkatkan jumlah keluarga bahagia dan sejahtera yang ditandai dengan menurunnya kasus kekerasan dalam rumah tangga; berkurangnya kasus perceraian dan semakin meningkatnya masyarakat yang tinggal di rumah layak huni.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Proporsi temuan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan; ditargetkan 0.0006 persen.
- Cakupan ketersediaan rumah layak huni ditargetkan sebesar 94;0788 persen.

6.1.2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri

Upaya lain yang perlu dilakukan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman; tentram dan dinamis adalah dengan mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat termasuk kaum perempuan dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Jumlah Nagari tangguh bencana utama; ditargetkan sebanyak 60 nagari.
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ditargetkan mencapai nilai sebesar 56;93.

4.4. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka, Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan arah kebijakan pada

	<p>Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM : kesehatan dan pendidikan. 2. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan <i>decent job</i>. 3. Mendorong pemulihan dunia usaha. 4. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan. <p>2. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Percepatan pembangunan insrastruktur dasar antara lain ai bersih, dan sanitasi. 4. Pembangunan Ibu Kota Nusantara. <p>Berdasarkan hal diatas maka sasaran pembangunan pada RKP tahun 2023 baik pada tingkat Nasional, Regional dan Sumatera Barat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,9 % 2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 % 3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0 % 4. Rasio Gini sebesar 0,375 – 0,378 5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,29 – 73,35 6. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5 – 8,5 % 7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103 – 105 8. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 105 – 107 <p>Selanjutnya, pada RKP Tahun 2023 terdapat delapan arah kebijakan yang menjadi fokus pembangunan nasional, dan dengan itu dukungan yang diberikan oleh RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, dengan strategi : 2. Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan Pendidikan, dengan strategi : 3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan <i>decent job</i>
--	--

4. Mendorong pemulihan dunia usaha, dengan strategi :
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dengan strategi :
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim), dengan strategi :
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih, dan sanitasi, dengan strategi :
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah)

Dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
1	Indek Pembangunan Manusia	tanpa satuan	70,59
2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	41,17
3	Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	60 (B)
4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	WTP
5	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	72 (BB)
6	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3223
7	Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	3 (3,05)
8	Indeks Kelembagaan	tanpa satuan	P-4 (efektif)
9	Indeks SPBE	tanpa satuan	3,35
10	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	71
11	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	94 (informatif)
12	Indeks Inovasi Daerah	tanpa satuan	7,500
13	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public	tanpa satuan	84,00
14	Usia Harapan Hidup	tahun	71,39
15	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8
16	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	90
17	Prevalensi stunting	persen	11,2
18	Angka Kesakitan	persen	15,67
19	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	85

20	Tingkat Kemiskinan	persen	6,9
21	Indeks Gini	tanpa satuan	0,250
22	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	53,56
23	Pencapaian skor pola pangan harapan	persen	87
24	Pengeluaran perkapita	Juta Rp./org /thn	9.369.000
25	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rp.	9,992
26	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.	310.000
27	Nilai PDRB pertanian (ADHK)	Rp. Triliun	3,72
28	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	717,93
29	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,4
30	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	persen	32,90
31	Rasio Konektivitas	persen	58
32	Proporsi lahan sawah ber irigasi baik	persen	60,75
33	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	86,94
34	Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	orang	5700
35	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1.440.000
36	Lama tinggal wisatawan	hari	1,25
37	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Rp	25
38	Persentase pemenuhan 8 standar pendidikan	persen	14,87
39	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,45
40	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,35
41	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	orang	7
42	Indeks Daya Saing Daerah bidang SDM	tanpa satuan	Tinggi
43	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan	6,643
44	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96,50
45	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	tanpa satuan	Rendah (≤ 10 org)
46	Jumlah prestasi tingkat provinsi dan nasional	buah	10
47	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	tanpa satuan	69,92
48	Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0,0008
49	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	91,0944
50	Jumlah nagari tangguh bencana	unit nagari	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)
51	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan	56,93

4.5. Sasaran dan Target Kinerja Bapedalitbang Tahun 2023

Sasaran strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja Bapedalitbang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dokumen Pembangunan	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja	43,20
2	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Bapedalitbang	A
3	Meningkatnya Peran Dalam Kelitbangan Pembangunan Daerah	Persentase Kelitbangan yang diterapkan dalam Dokumen Perencanaan	90%
4	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang 2. Indeks Inovasi Daerah	100 62,32

4.6. Gambaran Umum Badan Perencanaan Daerah; Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah; Penelitian dan Pengembangan; dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok; Fungsi; Tata Kerja; dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Penelitian dan Pengembangan; dimana Bapedalitbang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan; Penelitian dan Pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan dengan tugas; fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

	<p>a. Tugas Pokok:</p> <p>Membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.</p> <p>b. Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan; 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah; dan urusan penelitian dan pengembangan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan; 4. Pengevaluasian pelaksanaan pembangunan; penelitian dan pengembangan. <p>c. Struktur Organisasi</p> <p>Susunan Organisasi Badan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Badan; b) Sekretariat membawahi tiga (3) Sub Bagian; terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Program; dan 3) Sub Bagian Keuangan. c) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; membawahi 3 (tiga) Sub Bidang; terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Bidang Pemerintahan; 2) Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan 3) Sub Bidang Pemberdayaan dan Kependudukan. d) Bidang Perekonomian; Sumber Daya Alam; Infrastruktur dan Kewilayahan; membawahi 3 (tiga) Sub Bidang; terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Bidang Perekonomian; 2) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan 3) Sub Bidang Pangan dan Sumber Daya Alam. e. Bidang Perencanaan; Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; membawahi 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; 2) Sub Bidang Data dan Informasi;
--	--

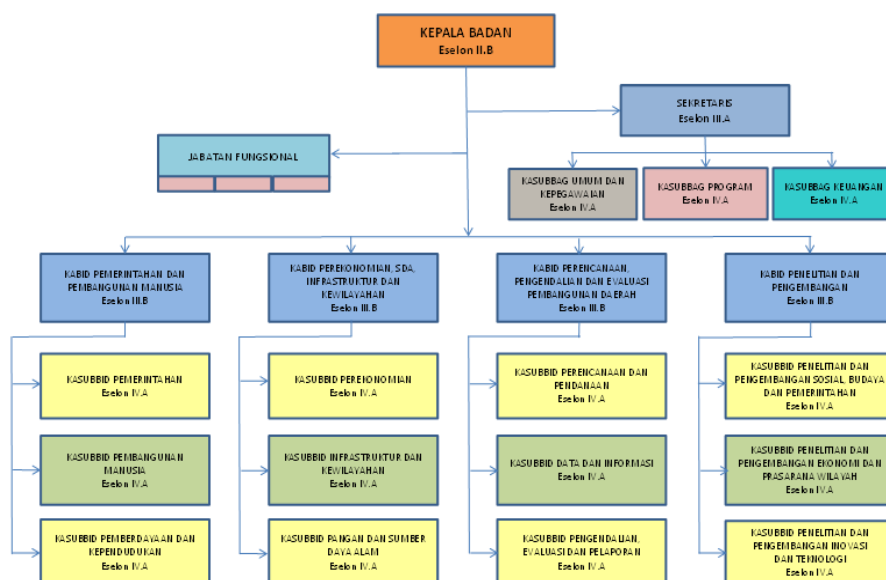
3) Sub Bidang Pengendalian; Evaluasi dan Pelaporan.
f. Bidang Penelitian dan Pengembangan; membawahi 3 (tiga) Sub Bidang; terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial; Budaya dan Pemerintahan;
- 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah; dan
- 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

g. Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada bagan dibawah Ini:

Struktur Organisasi Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan



d. Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi unsur pelaksanaan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan; penelitian dan pengembangan; Bapedalitbang memiliki Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya.

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Badan Perencanaan Daerah; Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 52 orang; dengan rincian:

	<p>1) Pegawai Negeri Sipil sebanyak 38 orang</p> <p>Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Perencanaan Daerah; Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 38 orang. Dari jumlah tersebut PNS berdasarkan kepangkatan didominasi oleh pangkat Penata Tk. I (III/d) berjumlah 15 orang dan Penata (III/c) berjumlah 1 orang, Penata Muda TK. I (III/b) berjumlah 6 orang, Penata Muda (III/a) berjumlah 6 orang dan Pengatur (II/c) berjumlah 1 orang dari jumlah seluruh PNS sebanyak 38 orang. Sementara itu; berdasarkan Pendidikan; PNS Bapedalitbang didominasi oleh Strata 1 (S.1) 20 orang atau 58;82 persen. Sedangkan strata Pendidikan S.2 berjumlah 13 orang (25 persen); SLTA sebanyak 4 orang (12 persen) dan D.III sebanyak 2 orang (3 persen).</p> <p>2) Tenaga Honorer</p> <p>Selain Pegawai Negeri Sipil; Badan Perencanaan Daerah; Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan juga dibantu oleh Tenaga Honorer (Non PNS) berjumlah 17 orang; syant terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pramu Kantor sebanyak 5 orang. - Penjaga Kantor sebanyak 2 orang. - Petugas Kebersihan sebanyak 5 orang. - Sopir sebanyak 2 orang. - Tenaga Pembantu Admin Daerah SIPD sebanyak 1 orang. - Tenaga Sukarela sebanyak 2 orang. <p>Sarana dan Prasarana Penunjang</p> <p>Sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah; Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:</p>
--	---

Daftar Sarana dan Prasarana Penunjang Bapedalitbang			
No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
A.	<u>Bangunan Gedung</u>		
1.	Gedung Kantor	2	Baik
2.	Pagar Gedung Kantor	1	Baik
3.	Bangunan Parkir Roda 4 dan Roda 2	3	Baik
4.	Ruangan Genset	1	Baik
5.	Bangunan Merek Kantor	1	Baik
B.	<u>Fasilitas Kantor</u>		
1.	Ruang Tempat Ibadah	1	Baik
2.	Ruang Rapat	2	Baik
3.	Ruang Kepala	1	Baik
4.	Ruang Sekretaris	1	Baik
5.	Ruang Kepala Bidang	4	Baik
6.	Ruang Keuangan	1	Baik
7.	Meja Kerja	59	Baik
8.	Meja Rapat	20	Baik
9.	Kursi Tamu	6	Baik
10.	Kursi Kerja	28	Baik
11.	Kursi Rapat	6	Baik
12.	Sofa Tamu	2	Baik
13.	Mesin Fax	2	Baik
14.	Komputer/PC	13	Baik
15.	GPS	5	Baik
16.	Alat penghancur kertas	2	Baik
17.	UPS	5	Baik
18.	Mesin potong rumput	2	Baik
19.	Genset	3	Baik
20.	Lemari Besi	20	Baik
21.	Filling Kabinet	1	Baik
22.	AC	32	Baik
23.	Lemari piring	1	Baik
24.	Wireless outdoor	3	Baik
25.	Laptop	27	Baik
26.	IPAD	7	Baik
27.	Hard Disk External	7	Baik
28.	Printer	34	Baik
29.	Software/ Aplikasi	1	Baik
26.	Drone	1	Baik
27.	Jalan khusus kantor	2	Baik
28.	Running teks	1	Baik

	29.	Instalasi jaringan elektronik	1	Baik
	C.	<u>Kendaraan Dinas</u>		
	1.	Kendaraan Roda 4	3	Baik
	2.	Kendaraan roda 2	6	Baik
BAB V	PENUTUP			
	<p>Demikianlah beberapa catatan yang penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja pada Badan Perencanaan Daerah; Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023. Semoga dapat memperjelas laporan Keuangan Badan Perencanaan Daerah; Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.</p>			



Painan, 5 Januari 2024
Kepala Bapedalitbang
Kabupaten Pesisir Selatan,

HADI SUSILO; S.STP., M.Si.
NIP. 19770522199703 1 00